

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Proyek Revitalisasi Monas Menuai Protes

DPRD meminta pemerintah DKI Jakarta menghentikan sementara pemugaran Taman Monas.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Kelompok sipil, pengamat tata kota, hingga Dewan Perwakilan Rakyat ramai-ramai memprotes revitalisasi Monumen Nasional yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penentang menilai proyek seharga Rp 264 miliar ini bertentangan dengan sejumlah aturan dan minim sosialisasi kepada masyarakat.

Sekretaris Komisi B DPRD Jakarta Pandapotan Sinaga menilai proyek tersebut janggal karena asal-usul pendanaannya tak jelas. "Ini melanggar. Kami minta dihentikan sementara," kata Sinaga di Monas, kemarin.

Dewan melakukan pemeriksaan mendadak setelah kelompok sipil dan masyarakat memprotes penebangan 190 pohon di sisi selatan Monas. Selain menginspeksi lokasi, Kebon Sirih memanggil Unit Pengelola Kawasan Monas dan perwakilan kontraktor proyek pembangunan Plaza Selatan Monas. Hasilnya, DPRD menemukan informasi proyek tersebut seharusnya selesai dalam kurun waktu 50 hari sejak November 2019. "Proyek ini pakai anggaran tahun 2019, tapi dilaksanakan tahun 2020. Lalu duitnya pakai yang mana? Tidak bisa seperti ini," ujar Sinaga.

Berdasarkan desain yang bertajuk Rencana Tapak Medan Merdeka, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI akan merombak sebagian besar kawasan Monas. Selain Plaza Selatan, DKI akan membangun delapan ruang publik lain, empat jalur pintu masuk, ruang terbuka hijau, kolam, kanal, dan sejumlah jalur kegiatan masyarakat. Proyek ini tercatat sebagai tahun jamak dengan periode 2019-2021.

Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menilai masyarakat memprotes proyek tersebut akibat minimnya keterbukaan informasi dari Balai Kota. Hal ini tampak pada ketiadaan akses informasi tentang lelang desain revitalisasi Monas yang digelar dua tahun lalu. Pemilihan desain dan pemenang pada awal 2019 pun juga tak pernah disosialisasi. "Sayembara itu didanai publik, tapi, baik proses maupun hasilnya, tidak ada keterlibatan publik," ujar Elisa.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus juga menolak konsep revitalisasi kawasan Monas dengan penebangan pohon. Dia menilai Pemprov DKI seharusnya memiliki cara kerja dan kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Pohon-pohon besar yang telah puluhan, mungkin lebih dari seratus tahun, tumbuh di area 80 hektare

tersebut, seharusnya tidak ditebas, tapi dipindahkan ke lokasi lain. "Kalau tidak mampu, kan bisa membeli alatnya. Anggaran pemerintah besar," kata dia.

Ketua Umum Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan pemerintah DKI berikut Gubernur Anies Baswedan bisa dilaporkan ke polisi dengan tuduhan perusakan lingkungan di kawasan Monas. Menurut dia, Pasal 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas memerintahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, Pasal 22 mewajibkan setiap kebijakan yang berpengaruh pada lingkungan hidup harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Menurut Tigor, hingga saat ini belum pernah ada informasi dan dokumen amdal dari proyek pemugaran tersebut. Senada dengan DPRD, Fakta juga meminta proyek yang dianggarkan Rp 114 miliar pada anggaran 2020 tersebut dihentikan. "Kebutuhan ruang terbuka hijau di Jakarta harus 30 persen, sekarang ini baru 9 persen," kata dia. "Masih minim begitu, kok ini pohon-pohon malah ditebang."

Kepala Subbagian Tata

Usaha Unit Pengawas Kawasan Monas Endrati Fariani mengklaim pemerintah telah menanam kembali pohon yang dipindahkan dari lokasi rencana pembangunan Plaza Selatan. Dia mengklaim sebagian kecil memang ditebang, tapi telah diganti oleh penanaman pohon yang jumlahnya 10 kali lipat. "Lokasinya belum bisa dirinci," kata dia. ● JULNIS FIRMANSYAH | IMAM HAMDI

FAKTA.OR.ID



"Kebutuhan ruang terbuka hijau di Jakarta harus 30 persen, sekarang ini baru 9 persen. Masih minim begitu, kok ini pohon-pohon malah ditebang."

—Azas Tigor Nainggolan
Ketua Umum Forum Warga Kota Jakarta (Fakta)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Proyek Revitalisasi Monas Menuai Protes

Katanya, Pohon Itu Dipindah, Bukan Ditebas

ADA yang berbeda saat mengunjungi Monas hari-hari terakhir. Saat pengunjung masuk dari selatan—yang memiliki area parkir—hari yang panas menjadi lebih panas, hujan menjadi lebih basah. Penyebabnya, 205 pohon di sisi selatan—yang mungkin jadi saksi bisu saat Bung Karno berpidato dalam Rapat Raksasa Lapangan Ikada, 19 September 1945—habis dibabat untuk revitalisasi Taman Monas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Monumen Nasional Isa Sanuri membantah tuduhan tersebut. "Bukan ditebang begitu saja," ujarnya, kemarin. Dia mengatakan pohon-pohon tersebut direlokasi. Kalau gagal, mereka menjamin menggantinya dengan pohon baru.

Isa mengatakan pembangunan Plaza Selatan Monas, yang dimulai November 2019, membuat 150 pohon berbatang besar *ngungsi* ke lahan parkir IRTI di bagian barat daya Monas. Sedangkan 55 pohon berbatang kecil dipindahkan ke sisi timur dan barat. Sejumlah plaza dalam revitalisasi ini, dia melanjutkan, juga akan menambah jumlah ruang terbuka hijau di kawasan Monas. "Pengunjung Monas akan merasa sejuk. Monas juga akan semakin hijau," kata dia.

Berdasarkan pemantauan *Tempo*

kemarin, calon lokasi Plaza Selatan telah bersih dari sisa-sisa pohon. Namun kami kesulitan menemukan tempat relokasi pohon-pohon tua tersebut, baik di parkir IRTI maupun sisi timur dan barat.

Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Pandapotan Sinaga juga mencari pohon-pohon korban gusuran itu saat melakukan inspeksi mendadak kemarin. Namun dia pulang ke Kebon Sirih dengan tangan hampa. "Yang kami lihat ditebang, bukan dipindahkan," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Juru bicara PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin, mengatakan perusahaannya juga pernah menebang 92 pohon di sisi barat Monas untuk pembangunan gardu listrik bawah tanah stasiun kereta *mass rapid transit* rute 1 fase II. Menurut dia, perusahaannya mengganti keberadaan pohon tersebut dengan penanaman pohon baru 10 kali lebih banyak.

Kamaluddin mengatakan PT MRT telah menanam 800 pohon tabebuya dan 120 cemara berdiameter batang 15-20 sentimeter di sekitar tugu Monas. "Kami pelihara secara intensif selama tiga bulan sejak waktu penanaman," kata dia.

● FRANCISCO L. IMAM